BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia, kelompok-kelompok Islam dari berbagai aliran yang tergabung ke dalam organisasi masyarakat Islam sangatlah beragam. Kelompok-kelompok tersebut terbentuk dari adanya pemahaman yang berbeda dalam menafsirkan dan menjalankan syari'at Islam (Sutopo, 2010).

Dikutip dari Sutopo (2010), menurut Ricklefs, kelompok Islam di Indonesia tidak dapat dibagi dengan cara sederhana, harus ada parameter yang jelas untuk dapat menggolongkan kelompok Islam seperti teologi dasar, interpretasi terhadap teologi, pandangan mengenai perempuan, pandangan mengenai budaya lokal, pandangan mengenai hal mistik, serta keterlibatan kelompok Islam tersebut dalam ranah politik (Sutopo, 2010, p. 91).

Di Indonesia ada beberapa kelompok umat Islam yang memiliki popularitas cukup tinggi. Salah satunya adalah organisasi masyarakat Islam Nahdlatul Ulama' (NU) yang pertama kali diperkenalkan oleh KH. Hasyim Asy'ari. Dikenal sebagai ormas Islam tradisionalis yang mempunyai ideologi Islam moderat, dan positioningnya dalam gelanggang politik nasional selalu berjalan beriringan dengan pemerintah (Basyir, 2016, p. 349).

Kemudian ada organisasi masyarakat Islam Muhammadiyah yang pertama kali diperkenalkan oleh KH. Ahmad Dahlan sebagai kelompok Islam modernis di Indonesia. Meskipun pengikut Muhammadiyah tidak sebanyak pengikut NU, akan tetapi jika mengukur popularitas, masyarakat Islam di Indonesia pasti akan menyetujui jika keberadaan Muhammadiyah dalam lingkup masyarakat sudah sama terkenal dan digandrunginya dengan NU. Sebagian orang bahkan mengidentifikasi Muhammadiyah sebagai kelompok masyarakat Islam yang mampu membawa ruh modenisasi ajaran keislaman di Indonesia (Rahem, 2017, p. 3).

Banyaknya organisasi masyarakat Islam yang mulai menyebar di Indonesia dengan pengikut yang tentu tidak sedikit, berpotensi besar menyumbang kekuatan politik yang masif bagi pemerintah maupun penguasa. Tidak hanya dianggap sebagai organisasi masyarakat, biasanya organisasi-organisasi dengan jumlah massa yang besar kerap kali dijadikan sebagai alat ekstra-parlementer guna mendukung penguasa dalam memperkuat suaranya di tatanan pemerintahan. Kelompok ormas Islam dengan pengaruh politik yang besar mampu menjadikan Mereka sebagai kelompok hegemoni politik.

Hegemoni dalam pengertian sederhana diartikan sebagai sebuah istilah yang merujuk pada dominasi dari suatu kelompok atas kelompok lain. Dalam praktiknya, Hegemoni sendiri merupakan upaya untuk mempertahankan dominasi suatu kelompok yang biasanya disokong oleh norma dan gagasan yang melegitimasi aktivitas Hegemoni melalui penguasaan ideologi dari kelas yang dominan untuk melakukan hegemoni (Gina Nur Maftuhah, 2021, p. 23).

Sebagaimana yang diterangkan oleh Antonio Gramsci dalam teori hegemoni, bahwa hegemoni bukanlah hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, akan tetapi hubungan persetujuan yang mengunakan kepemimpinan politik dan ideologi sebagai instrumennya. Dengan demikian, berbeda dengan makna aslinya dalam bahasa Yunani yang berarti penguasaan satu bangsa atas bangsa lainnya, hegemoni dalam pengertian Gramsci adalah sebuah organisasi konsensus dimana ketertundukan diperoleh melalui penguasaan ideologi dari kelas yang menghegemoni (Siswati, 2018, p. 101).

Berbeda dengan awal mula kemunculan hegemoninya Gramsci, hegemoni politik cenderung lebih erat kaitannya dengan para pemilik kekuasaan maupun kepentingan dalam ranah-ranah politik. Hal ini ditunjukan dengan adanya kelompok penguasa dan kelompok kepentingan dalam ranah politik menggunakan legitimasi kekuasaan maupun kepopulerannya untuk menjadikan seseorang maupun suatu kelompok sebagai bagian dari pendukung kelompok penguasa (Ali, 2017).

SUNAN GUNUNG DJATI

Saat ini, organisasi Masyarakat Islam yang memiliki pengaruh politik besar dalam setiap kontestasi politik di Indonesia, baik regional, daerah, hingga Nasional, mampu menjadi kelompok penghegemoni. Dan kelompok Masyarakat Islam yang paling berpengaruh dan memiliki potensi terbesar untuk menjadi kelompok penghegemoni adalah Nahdlatul Ulama'.

Nahdlatul Ulama' sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan tidak hanya dalam ranah keagamaan, tetapi juga pada aspek sosial, budaya, dan politik. Di Kabupaten Tasikmalaya, NU memiliki basis massa yang sangat kuat dan mengakar pada kehidupan masyarakat, termasuk di Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya. Kondisi ini menjadikan NU sebagai salah satu aktor penting dalam dinamika sosial-politik di tingkat lokal.

Kecamatan Sukarame dikenal sebagai wilayah yang masyarakatnya mayoritas berafiliasi dengan tradisi keagamaan Islam Ahlussunnah wal Jama'ah, yang merupakan basis ideologi NU. Hal ini menjadikan NU memiliki ruang yang luas untuk melakukan konsolidasi sosial-politik untuk memengaruhi arah pembangunan dan kebijakan lokal, baik melalui jalur kultural maupun struktural.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Bapak Drs. KH. Atam Rustam Hazim, M.Si selaku Sekretaris Pondok Pesantren KH. Zainal Musthafa sekaligus mantan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama' (PCNU) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020-2025, tercatat hampir 15.000 orang yang terbagi ke dalam golongan santri dan Masyarakat setempat merupakan anggota aktif ormas Islam Nahdlatul Ulama'.

Data yang diungkapkan dalam keterangan Bapak Atam belum bisa dikatakan sebagai data yang bersifat resmi. Peneliti tidak dapat menemukan data resmi terkait berapa sebenarnya anggota NU di Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya, meskipun telah mencoba untuk mencari data diberbagai platform informasi resmi NU baik di tingkat Kabupaten maupun Kecamatan, menanyakan ke beberapa narasumber yang memiliki keterkaitan dengan NU di Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya termasuk Bapak Atam.

Namun, keterangan beberapa narasumber dalam proses wawancara meyakini bahwa NU di Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya memang kelompok ormas Islam paling besar disana dibandingkan dengan kelompok ormas Islam Muhammadiyah dan Persis yang menurut Mereka jauh lebih kecil. Hal tersebut dilihat dari aspek popularitas dan eksistensi NU yang berkembang di Masyarakat.

NU di Sukarame berperan sebagai representasi mayoritas umat yang secara tidak langsung menjadi penentu arah preferensi politik masyarakat. Kehadiran NU dalam ranah politik lokal juga dianggap mampu menjadi instrumen kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah desa maupun kecamatan, sehingga kepentingan masyarakat akar rumput tetap terjaga. Dengan semakin kompleksnya arus politik nasional yang merembes hingga ke daerah, NU di Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya memiliki posisi strategis untuk memastikan bahwa nilai-nilai keislaman, keadilan sosial, dan kebersamaan tetap menjadi dasar dalam setiap proses politik di Sukarame.

Dengan demikian, hegemoni politik NU di Kecamatan Sukarame tidak hanya penting dipahami sebagai fenomena lokal semata, melainkan juga sebagai cerminan dari bagaimana kekuatan kultural dan religius dapat membentuk arah politik masyarakat. Kajian ini menjadi urgen untuk melihat sejauh mana pengaruh NU mampu mengkonstruksi identitas politik masyarakat, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan religius dan kepentingan politik NU sebagai kelompok penghegemoni ditingkat lokal.

Adapun Antonio Gramsci menjelaskan bahwa terdapat dua aspek penting bagi penyebaran hegemoni dari kelas dominan yaitu pendidikan dan mekanisme kelembagaan. Pendikan yang buruk akan mengakibatkan pada tidak adanya sikap kritis dalam berpikir dimasyarakat, dan sistem kelembagaan dalam hal ini seperti partai politik, media massa, gereja atau kelompok agama menjadi tangan-tangan kelompok yang berkuasa untuk menyebarkan ideologi yang akan mendominasi (Osanloo, 2024).

Gramsci juga menjelaskan bahwa terdapat tiga aspek yang saling berhubungan antara hubungan sosial dan praktik hegemoni yang diakhiri dengan pembentukan strategi hegemoni. Ketiga aspek yang menjadi bentuk hubungan sosial dan hegemoni adalah aspek ekonomi, negara dan masyarakat sipil (Arditi, 2021).

Aspek Ekonomi yang dimaksud oleh Gramsci adalah sebuah batasan yang menjelaskan mode produksi yang paling dominan di masyarakat dan memunculkan perbedaan kelas sosial, karena hal demikian kelompok dominan memiliki akses sumber daya yang besar serta dapat mengontrol distribusi ekonomi. Kebijakan ekonomi yang digagas oleh kelompok penghegemoni akan mengakibatkan masyarakat kecil bergantung pada apa yang diberikan oleh kelompok penghegemoni.

Gramsci juga menjelaskan bahwa negara/birokrasi adalah tempat lahirnya sebuah lembaga seperti polisi, tentara, partai politik, serta tempat memproduksi kebijakan yang akan memengaruhi kehidupan ekonomi, sosial dan politik Masyarakat.

Penguasaan atas lembaga-lembaga negara akan menciptakan atau penyebaran nilai secara ideologis seperti pembentukan wacana politik melalui partai lalu adanya bentuk pengaruh dari tokoh tertentu dan penguasaan sistem pendidikan yang akan membentuk pola pikir yang tidak kritis dan kontrol atas media untuk menyebarkan narasi yang menguntungkan kelompok dominan.

Lalu, Masyarakat sipil adalah organisasi lain diluar konsep ekonomi dan negara yang dibuat dan di jalankan kelompok masyarakat sipil salah satunya dapat diartikan sebagai sebuah institusi religius. Kelompok-kelompok agama sebagai penyebar nilai pun memiliki andil besar dalam jalannya suatu hegemoni seperti NU di Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya.

Maka pengendalian nilai yang bersifat kultural seperti norma, budaya, penggunaan simbol, bahasa atau ritual kepercayaan tertentu menjadi alat legitimasi agar dapat diterima penggunaan narasi nilai moral dan agama pun dapat digunakan

untuk menerima pembenaran kepemimpinan kelompok dominan. Adapaun hal-hal yang berkaitan dengan penyebaran hegemoni tentu melekat dengan penyampaian pesan melalui komunikasi baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Berdasarkan penjelaskan tersebut, ormas Islam Nahdlatul Ulama' di Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya dapat dikatakan sebagai kelompok yang telah memenuhi beberapa aspek yang disebutkan oleh Gramsci. Kelompok Nahdlatul Ulama' dalam hal ini mampu mengatur mekanisme kelembagaan dan pendidikan dalam sistem Pondok Pesantren.

Mengontrol distribusi ekonomi dengan memanfaatkan akses birokrasi yang Mereka miliki, untuk menciptakan suatu kondisi dimana Masyarakat Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya memiliki ketergantungan terhadap NU sebagai kelompok penghegemoni dalam hal ekonomi karena terdapat perbedaan kelas sosial.

Dengan demikian, praktik hegemoni politik kelompok ormas Islam Nahdlatul Ulama' menghasilkan doktrin dan ideologi wacana politik NU yang masif bagi Masyarakat, memperkuat budaya politik parokial dan budaya politik kaula, mengakibatkan stagnansi dalam proses perubahan sosial dan juga politik, serta memengaruhi perilaku pemilih di Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

NU juga telah dianggap mampu mengorganisir massa yang berasal dari barisan Masyarakat sipil untuk menjadi bagian dari kelompok Mereka, dengan cara subordinasi agar Masyarakat Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya tunduk terhadap segala tindak-tanduk NU dalam urusan sosial-politik.

Hal tersebut juga tidak terlepas dari pengaruh doktrinasi yang dilakukan oleh kelompok ormas Islam Nahdlatul Ulama' di Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya, melalui penyebaran paham keagamaan, sosial, maupun politik yang selaras dengan paham NU, dan diterima dengan baik oleh Masyarakat pada saat mengenyam pendidikan di pondok pesantren maupun di ruang publik lainnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh dan lebih komprehensif tentang praktik hegemoni politik Nahdlatul Ulama' dengan judul Hegemoni Politik di Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya.

B. Rumusan Masalah

Dalam Penelitian ini, Peneliti bermaksud meneliti seberapa jauh praktik hegemoni politik berlangsung di Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya. Oleh sebab itu, rumusan masalah yang coba Peneliti rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk hegemoni politik Nahdlatul Ulama' di Kecamatan Sukarame?
2. Apa penyebab Masyarakat Kecamatan Sukarame bisa dengan mudah dihegemoni oleh ormas Islam Nahdlatul Ulama' terlebih dalam persoalan politik?
3. Bagaimana pandangan Masyarakat Kecamatan Sukarame terkait hegemoni politik Nahdlatul Ulama'?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk hegemoni politik yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama' di Kecamatan Sukarame
2. Untuk mengetahui penyebab masyarakat Kecamatan Sukarame mudah dihegemoni oleh ormas Islam Nahdlatul Ulama' di Kecamatan Sukarame
3. Untuk mengetahui pandangan Masyarakat Kecamatan Sukarame terkait hegemoni politik Nahdlatul Ulama'

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dari segi akademis maupun praktis. Sebagai seorang akademisi di bidang ilmu politik tentu kebermanfaatan atas apa yang peneliti sampaikan diharapkan mampu memperluas pemahaman masyarakat terhadap ilmu politik itu sendiri, terkhusus persoalan hegemoni politik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

Selain itu, manfaat yang diharapkan adalah untuk memberikan informasi, data serta fakta yang terjadi selama penelitian kepada pembaca, guna mengetahui bagaimana sebenarnya aktivitas hegemoni dari sisi politik di jalankan oleh kelompok komunal keagamaan kepada masyarakat secara luas. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu mengedukasi pembaca terkhusus masyarakat umum supaya mudah dalam membaca aktivitas hegemoni yang dijalankan di lingkungan masyarakat terkhusus Kecamatan Sukarame.

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat menelaah serta menganalisis dengan seksama peristiwa politik yang terjadi di sekitar mereka terkhusus menyoali praktik hegemoni politik yang digencarkan oleh kelompok komunal keagamaan di sekitar masyarakat terutama masyarakat Kecamatan Sukarame.

E. Kerangka Berpikir

Hegemoni merupakan sebuah teori yang dipopulerkan oleh seorang tokoh Sosiolog yang berasal dari Italia yakni Antonio Gramsci. Antonio Gramsci menyatakan bahwa hegemoni merupakan praktik mengorganisir masa melalui praktik koersi kekuasaan (*by force*) maupun tidak, dimana kelompok dominan (pemegang kekuatan terbesar) memengaruhi masyarakat pinggiran untuk sepaham dan senarasi dengan keinginan kelompok dominan (Hutagalung Daniel, 2004).

Dari sana bisa kita garis bawahi bahwa Gramsci menganggap praktik hegemoni politik akan selalu bermuara pada narasi yang menjurus kepada "keinginan kolektif" yang berarti universal. Dimana penghegemoni mampu menanamkan keinginan terselubungnya kepada masyarakat sehingga keinginan tersebut dapat diamini dan menciptakan ekspresi politik dari sistem hegemoni yang diciptakan melalui ideologi penghegemoni. Jadi, secara umum bisa dikatakan bahwa hegemoni dalam pemahaman Gramsci adalah praktik mengorganisir persetujuan maupun proses yang dijalankan melalui bentuk-bentuk kesadaran yang tersubordinasi (Agustín & Jørgensen, 2024).

Dewasa ini, di Indonesia terdapat satu kelompok organisasi Islam terbesar yang tidak pernah absen keikutsertaannya dalam jenjang politik nasional.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Organisasi tersebut adalah Nahdlatul Ulama' atau yang familiar disebut NU. Nahdlatul Ulama' (NU) merupakan organisasi yang mempunyai corak yang melekat dalam pandangan masyarakat Indonesia sebagai kelompok yang merepresentasikan Islam tradisionalis (Salik, 2020).

Nahdlatul Ulama' secara historis memiliki *track record* yang cukup panjang dalam dunia politik nasional. Semisal pada tatanan politik nasional, Nahdlatul Ulama' dipercaya pertama kali ikut serta dalam ranah politik nasional pada masa orde lama yakni pada pembentukan Partai Masyumi, kemudian bergabung ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada masa orde baru, dan pasca keruntuhan orde baru Nahdlatul Ulama' kembali mendirikan partai yang diduduki oleh para kader Nahdlatul Ulama' itu sendiri yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (Mubin, 2020).

Dapat dilihat dengan eksistensi dan kepopuleran Nahdlatul Ulama' sebagai organisasi masyarakat Islam yang berkancah dalam dunia politik baik daerah maupun nasional. Nahdlatul Ulama' disinyalir merupakan kelompok Islam yang mempunyai kepentingan dalam tatanan kekuasaan. Dengan mumpuninya instrumen politik yang dimiliki oleh organisasi ini serta kemampuan untuk memengaruhi masyarakat, menjadikan kelompok ini sebagai kelompok yang paling berpengaruh dalam dinamika politik nasional (Safiuddin et al., 2024).

SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Oleh sebab itulah, Nahdlatul Ulama' sebagai kelompok Islam terbesar mampu memengaruhi masyarakat sampai dengan sikap dan pilihan politik masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, Nahdlatul Ulama' dalam hal ini layak menyandang gelar kelompok kepentingan yang mapan dan penuh potensi di lingkaran politik nasional.

Dalam kasus ini, sikap politik merupakan cara seseorang melihat, merasakan dan menilai segala sesuatu yang mengandung unsur politis di dalamnya. Sikap politik sendiri bisa lahir dari kesadaran dan sikap kritis seseorang, tekanan dari kelompok sosial maupun keagamaan yang mempunyai kepentingan politk

sampai dengan nasihat ataupun pendapat pihak lain yang mendikte seseorang dalam menyikapi persoalan politik (Kisno, 2023).

Selain memengaruhi sikap politik, hegemoni politik yang dipraktikan oleh kelompok kepentingan politik secara ekstream akan menyasar pilihan politik masyarakat, strategi tersebut tidak lain digencarkan adalah untuk mengunci suara dan dukungan masyarakat supaya dengan sadar maupun tidak sadar berpihak kepada kelompok penghegemoni.

Adapun secara sederhana, pilihan politik sendiri diartikan sebagai sebuah bentuk partisipasi masyarakat dalam pemilu maupun Pilkada yang ditunjukan dengan aksi mendukung maupun memilih sosok yang mencalonkan diri sebagai Bacaleg, Bacapres dan lain sebagainya yang dipercayai akan menjadi representatif dan seseorang yang akan mewakili suara yang memilih tokoh tersebut pada gelaran kontestasi politik (Wibowo, 2021).

Dengan beberapa keterangan yang telah disebutkan sebelumnya, dapat ditarik benang merah yang menyebutkan secara sederhana bahwa hegemoni politik dalam kasus ini merupakan metode kelompok kepentingan yang diterapkan guna menghipnotis sikap dan pilihan masyarakat yang semula tidak sepemikiran dan tidak satu gerakan dengan kelompok tersebut menjadi sadar tidak sadar mengikuti skenario yang dibuat oleh para pemilik kepentingan sehingga masyarakat mau satu pemikiran dan satu gerakan dengan yang menghegemoni. Dalam kasus ini, hegemoni politik menyasar sikap dan pilihan masyarakat umum agar bisa satu narasi, satu pemikiran dan satu gerakan baik dalam dukungan kepada tokoh, partai, atau narasi politik tertentu yang berada di skala nasional maupun daerah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

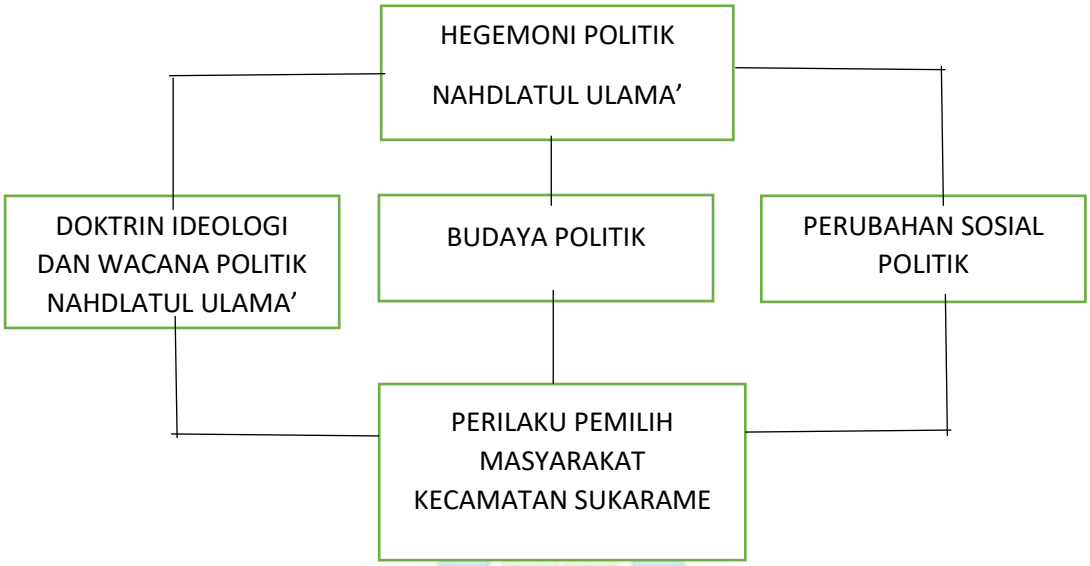

1.1.Tabel Kerangka Berfikir

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG